

**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Kep. Bangka Belitung
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
Ditjen Imigrasi
(06) UAPPA-W
AUDITED**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (06) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (06) Semester II Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (Ditjen Imigrasi). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Harau, 14 Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah
Harun S. Siantolo
50408 198/03 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
Lampiran dan Daftar	

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DITJEN PEMASYARAKATAN (05)**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (06) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah

Harlan Suliantjo
NIP. 1350408 198703 1 002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8,819,814,670 atau mencapai 201 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 4.386.250.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp 17,882,571,805 atau mencapai 88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 17,936,873,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 38.345.340.775 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 884,374,702; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 37,460,966,073; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 38,345,340,775.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 8,815,502,670, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 19,622,839,904 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 10,807,337,234. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 4,312,000 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 10,803,025,234

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 38,191,736,094 tambah Defisit-LO sebesar Rp 10,803,025,234 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 49,880 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 10,956,580,035 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai 38,345,340,775

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN IMIGRASI)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN
31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	REALISASI 2021
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.386.250.000	8.819.814.670	201,08	80.225.723
JUMLAH PENDAPATAN		4.386.250.000	8.819.814.670	201,08	80.225.723
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.065.080.000	6.039.977.854	99,59	5.758.176.760
Belanja Barang	B.2.2	10.510.032.000	10.485.032.551	99,76	7.388.200.068
Belanja Modal	B.2.3	1.361.761.000	1.357.561.400	99,69	690.826.000
JUMLAH BELANJA		17.936.873.000	17.882.571.805	99,70	13.837.202.828

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN IMIGRASI)**

NERACA

PER 31 Desember 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.2	884.374.702	912.598.198
Jumlah Aset Lancar		884.374.702	912.598.198
ASET TETAP			
Tanah	C.3	22.967.908.000	22.967.908.000
Peralatan dan Mesin	C.4	15.343.448.419	13.682.129.556
Gedung dan Bangunan	C.5	14.834.381.628	14.834.381.628
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.7	13.334.998	13.334.998
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(15.698.106.972)	(14.221.593.211)
Jumlah Aset Tetap		37.460.966.073	37.276.160.971
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	385.159.161	651.877.851
Aset Tak Berwujud		43.808.227	43.808.227
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.10	(428.967.388)	(692.709.153)
Jumlah Aset Lainnya		-	2.976.925
JUMLAH ASET		38.345.340.775	38.191.736.094
EKUITAS		38.602.791.943	
Ekuitas	C.13	38.345.340.775	38.191.736.094
JUMLAH EKUITAS		38.602.791.943	38.191.736.094
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		38.345.340.775	38.191.736.094

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN IMIGRASI)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN
31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	8.815.502.670	19.483.200
JUMLAH PENDAPATAN		8.815.502.670	19.483.200
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	6.039.977.854	5.758.176.760
Beban Persediaan	D.3	2.069.298.371	594.746.378
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.493.655.941	4.302.939.605
Beban Pemeliharaan	D.5	1.131.260.559	903.254.538
Beban Perjalanan	D.6	3.495.938.956	1.481.109.402
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.392.708.223	1.602.482.839
JUMLAH BEBAN		19.622.839.904	14.642.709.522
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.807.337.234)	(14.623.226.322)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	4.312.000	29.383.023
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.312.000	29.383.023
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(10.803.025.234)	(14.593.843.299)
POS LUAR BIASA	D.9	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(10.803.025.234)	(14.593.843.299)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN IMIGRASI)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN
31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	38.191.736.094	38.965.796.301
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10.803.025.204)	(9.637.611.087)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	49.880	51.473.168
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.1	-	51.473.168
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.956.580.035	13.768.308.924
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS		153.604.681	(774.060.207)
EKUITAS AKHIR	E.5	38.345.340.775	38.191.736.094

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkapinang- Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Ditjen Pemasaryakatan berkomitmen dengan visi **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penghormatan, pemenuhan, dan Perlindungan HAM.
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Yang Profesional dan Berintegritas.

Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yaitu “PASTI” :

- Profesional
- Akuntabel
- Sinergi
- Transparan
- Inovatif

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester IITA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Semester IITA 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah 10 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumla Satke
			KD	KB	DK	TR	
1	3000	Kanwil Div Imigrasi Babel	-	1	-	-	1

2	3000	Kanim Pangkalpinang	-	1	-	-	1
3	3000	Kanim TanjungPandan	-	1	-	-	1
Jumlah			-	3	-	-	3

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka

Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester IITA 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Rumah Dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar yaitu kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang

diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset

Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP	4.386.250.000	4.386.250.000
Jumlah Pendapatan	4.386.250.000	4.386.250.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.751.185.000	6.065.080.000
Belanja Barang	11.565.793.000	10.510.032.000
Belanja Modal	306.000.000	1.361.761.000
Jumlah Belanja	17.622.978.000	17.936.873.000

Realisasi

Pendapatan

Rp8,819,814,670

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8,819,814,670 atau mencapai 201 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 4.386.250.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berasal dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan;
2. Pendapatan Paspor
3. Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry; dan
4. Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagaiberikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PNBP	4.386.250.000	8.819.814.670	201,08
Jumlah	4.386.250.000	8.819.814.670	201,08

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 10893,75% dibandingkan realisasi pendapatan Semester II TA 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
PNBP	8.819.814.670	80.225.723	10893,75
Jumlah	8.819.814.670	80.225.723	10893,75

Realisasi

Belanja Negara

Rp17,882,571,805

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester IITA 2022 adalah sebesar Rp17,882,571,805 atau 88% dari anggaran belanja sebesar Rp 17.936.873.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.065.080.000	6.039.977.854	99,59
Belanja Barang	10.510.032.000	10.485.032.551	99,76
Belanja Modal	1.361.761.000	1.357.561.400	99,69
Total Belanja	17.936.873.000	17.882.571.805	99,70

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2022 dan 2021

REALISASI TA 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
6.039.977.854	5.758.176.760	4,89
10.485.032.551	7.388.200.068	41,92
1.357.561.400	690.826.000	96,51
17.882.571.805	13.837.202.828	29,24

Realisasi Belanja Semester II TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29,24% dibandingkan realisasi belanja pada Semester II TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain, adanya

realisasi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu.

*Belanja
Pegawai Rp.
6,039,977,854*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II TA 2022 adalah sebesar *Rp.* 6,039,977,854 atau mencapai 99,58% dari anggaran belanja sebesar Rp 6,065,080,000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Semester IITA 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,80 persen dari realisasi belanja Semester IITA 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2022 dan Semester II TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.211.135.854	5.205.645.760	0,11
Belanja Uang Makan	721.220.000	500.535.000	44,09
Belanja Lembur	107.622.000	51.996.000	106,98
Jumlah Belanja Kotor	6.039.977.854	5.758.176.760	4,89
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	6.039.977.854	5.758.176.760	4,89

*Belanja
Barang Rp.
17,882,571,805*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 17,882,571,85 dan Rp 13,837,202,828. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 mengalami kenaikan 29,24% dari Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja barang dan pagu anggaran lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	11.659.586.683	10.583.158.681	10,17
Belanja Barang Non Operasional	1.943.884.660	922.579.633	110,70
Belanja Barang Persediaan	327.921.145	241.120.454	36,00
Belanja Jasa	74.351.725	812.858.308	(90,85)
Belanja Pemeliharaan	380.888.636	588.185.462	(35,24)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.495.938.956	689.300.290	407,17
Jumlah Belanja Kotor	17.882.571.805	13.837.202.828	29,24
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	17.882.571.805	13.837.202.828	29,24

Berkaitan dengan alokasi Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Satker pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Divisi Keimigrasian-06) mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp90.718.000**. Untuk periode Semester II yang berakhir pada 31 Desember 2022 anggaran tersebut terserap sebesar **Rp 90.687.300** dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021

AKUN	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 86.178.000	Rp 86.148.300	99,97
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 4.541.000	Rp 4.539.000	99,96
	JUMLAH	Rp 109.367.000	Rp 90.687.300	82,92

Belanja Modal **B.2.3 Belanja Modal**

*Rp*1,357,561,400

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp*1,357,561,400 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.357.561.400	690.826.000	96,51
Jumlah Belanja	1.357.561.400	690.826.000	96,51

Rincian Belanja Modal :

1. Pembelian ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR : Rp. 1,023,600,000
2. Pembelian ALAT KANTOR : Rp. 26,894,400
3. Pembelian ALAT RUMAH TANGGA: Rp. 134,467,000
4. Pembelian KOMPUTER UNIT: Rp. 151,750,000
5. Pembelian PERALATAN KOMPUTER : Rp. 20,850,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan Rp

Rp 884,374,702

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 884,374,702 dan Rp 912.598.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Persediaan	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	884.374.702	912.598.198
Jumlah	884.374.702	912.598.198

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp22.967.908.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 22.967.908.000 dan Rp 22.967.908.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp 22.967.908.000
Mutasi tambah:	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 22.967.908.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	Rp -
Nilai Buku per 30 Desember 2022	Rp 22.967.908.000

Nilai tanah pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 16.270.913.000 dan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 6.696.995.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp15,343,448,419*

C.3 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15,343,448,419 dan *13.682.129.556*. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp 13.682.129.556
Mutasi tambah:	Rp 1.688.962.536
Mutasi kurang:	Rp 27.643.673
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 15.343.448.419

*Gedung dan
Bangunan Rp
14.834.381.628*

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 14.834.381.628 dan Rp 14.834.381.628. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 14.834.381.628
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Koreksi Pencatatan	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 14.834.381.628
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp 14.834.381.628

*Aset Tetap
Lainnya Rp
13.334.998*

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 13.334.998 dan Rp. 13.334.998 . Aset tetap tersebut berupa Buku dan Bahan Kartografi. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2021	Rp	13.334.998
Mutasi tambah:		
Pembelian		
Hibah Barang		
Transfer Masuk		
Koreksi tambah		
Mutasi kurang:		
Penghentian dari penggunaan		
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	13.334.998
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	13.334.998

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
15,698,106,972*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 15,698,106,972 dan Rp 14.221.593.211.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 , sedangkan Rincian akumulasi

penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Gedung dan Bangunan	14.834.381.628	2.592.571.292	Rp 12.241.810.336
2	Tanah	22.967.908.000	Rp -	Rp 22.967.908.000
3	Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -
4	Peralatan dan Mesin	15.343.448.419	13.105.535.680	Rp 2.237.912.739
5	Aset Tetap Lainnya	13.334.998		Rp 13.334.998
Akumulasi Penyusutan		Rp 53.159.073.045	Rp 15.698.106.972	Rp 37.460.966.073

C.7 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 43,808,227 dan Rp 43,808,227.

Rp 43,808,227

C.8 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp 385,159,161

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 385,159,161 dan Rp 651.877.851. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Babel serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 651.877.851
Mutasi tambah:	Rp 27.643.673
Mutasi kurang:	Rp 294.362.363
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 385.159.161

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 428,967,388 dan Rp 692.709.153. Rincian

Aset Lainnya akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah
*Rp*428,967,388 sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Software	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
43.808.227	385.159.161	428.967.388

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Ekuitas Rp
38,345,340,775

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp* 38,345,340,775 *Rp* 38.191.736.094

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.8,815,502,670

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp.8,815,502,670** dan Rp 19,483,200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 16.002.670	Rp 19.483.200	
Pendapatan Paspor	Rp 5.996.850.000		#DIV/0!
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entr)	Rp 2.406.150.000		#DIV/0!
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp 396.500.000		#DIV/0!
			#DIV/0!
Jumlah	Rp 8.815.502.670	Rp 19.483.200	45.

Beban

Pegawai Rp

6,039,977,854

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 6,039,977,854** dan Rp 5,758,176,760. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	4077513460	Rp 3.707.249.589	10,0
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 77.396	Rp 61.173	26,5
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 265.924.914	Rp 409.574.822	-35,1
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 63.718.334	Rp 46.276.688	37,7
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 185.450.000	Rp 137.830.000	34,5
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 309.420.000	Rp 204.720.000	51,1
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 2.202.369	Rp 1.728.896	27,4
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 236.161.620	Rp 175.908.180	34,3
Beban Uang Makan PNS	Rp 721.220.000	Rp 500.535.000	44,1
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 72.625.000	Rp 76.585.000	-5,2
Beban Uang Lembur	Rp 107.622.000	Rp 51.996.000	107,0
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	Rp 2.411.500		#DIV/0!
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 1.581		#DIV/0!
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 68.900		#DIV/0!
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS			#DIV/0!
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp -		#DIV/0!
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	Rp -	Rp 925.340	-100,0
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	Rp 13.780		
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 370.000		#DIV/0!
Jumlah	6.039.977.854	5.758.176.760	4,9

Beban

Persediaan Rp.

2,069,298,371

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,069,298,371 dan Rp 2,069,298,371 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester IITA 2022 dan 20201

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.069.298.371	594.746.378	247,93
Jumlah Beban Persediaan	2.069.298.371	594.746.378	247,93

Beban Barang dan Jasa Rp
5,493,655,941

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5,493,655,941 dan Rp 4,302,939,605. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 202 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	892067410	Rp 2.104.620.085	-57,61
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	76610000	Rp 30.705.000	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2219000	Rp 4.560.430	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	232680000	Rp 136.320.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	102190200	Rp 156.073.972	
Beban Bahan	538761656	Rp 213.361.888	
Beban Honor Output Kegiatan	94280000	Rp 86.290.000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1943884660	Rp 622.927.745	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	237591750	Rp 83.844.111	183,37
Beban Langganan Listrik	217459689	Rp 182.234.890	19,33
Beban Langganan Telepon	1452194	Rp 1.474.418	-1,51
Beban Langganan Air	298811212	Rp 6.750.000	4326,83
Beban Jasa Profesi	13500000		
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35558200	Rp 75.189.000	-52,71
Beban Sewa	793989970	Rp 590.088.066	34,55
Beban Jasa Lainnya	12600000	Rp 8.500.000	48,24
Jumlah	5.493.655.941	4.302.939.605	27,67

Beban Pemeliharaan Rp.
1,131,260,559

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1,131,260,559 dan Rp 903,254,538. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 407.473.450	Rp 560.309.492	-27,28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 719.482.109	Rp 335.415.735	114,50
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp 4.305.000	Rp 7.529.311	-42,82
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan			#DIV/0!
Jumlah	1.131.260.559	903.254.538	25,24

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
3,495,938,956*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,495,938,956 dan Rp 1,481,109,402. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 3.136.203.956	Rp 1.476.757.780	112,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 202.320.000	Rp 67.101.622	201,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 92.605.000	Rp -	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 64.810.000	Rp 62.750.000	
Jumlah	3.495.938.956	1.481.109.402	136,04

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1,392,708,223

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp 1,392,708,223* dan *Rp 1,602,482,839*. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 841.589.196	Rp 1.296.223.980	-35,07
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 548.142.102	Rp 274.071.052	100,00
Beban Amortisasi Software	Rp 2.976.925	Rp 2.976.952	-0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	Rp -	Rp 29.210.855	
Jumlah Beban Penyusutan	1.392.708.223	1.602.482.839	-Rp13,09

Beban dari Kegiatan Non Operasional Rp 0

D.8 Beban Dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp 0* dan *Rp 0*.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 4.312.000

D.9 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode

Semester II Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.312.000	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	310.000	-100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.312.000	310.000	1290,97

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp</i> 38,191,736,094	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 38,191,736,094 dan Rp 38,965,796,301
<i>Defisit LO Rp</i> 10,803,025,234	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp 10,803,025,234 dan Rp14,593,843,299. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp</i> 49,880	E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 49,880 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi Dokumen Keimigrasian (E-KITAP) dengan kode akun yang dikoreksi 1010315001, yaitu perubahan harga dokim. E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 51,473,168. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp.</i> 10,956,580,035	E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 10,956,580,035 dan Rp 13,768,309,924. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang

melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

**Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun Anggaran
2022**

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan Ke Entitas Lain	Rp 17.882.571.805
Diterima dari Entitas Lain	-Rp 8.819.814.670
Transfer Masuk	Rp 1.893.822.900
Jumlah	10.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 38,345,340,775 dan Rp 38,191,736,094.

Ekuitas Akhir

Rp 38,345,340,775

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

Tidak Terdapat Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.

